



BAB III	UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK.....	44
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	44
1.	Keadaan Geografis	44
2.	Keadaan Demografis	45
3.	Keadaan Pendidikan	47
4.	Keadaan Keagamaan	47
5.	Keadaan Ekonomi	51
B.	Deskripsi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.....	52
1.	Perjanjian Utang-Piutang.....	52
2.	Syarat-syarat Utang-Piutang	54
3.	Ijab Qabul Utang-Piutang	55
4.	Pembayaran Utang-Piutang	56
C.	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.....	57
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK.....	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		

Dalam dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa: tidak ada seorang muslim yang meminjamkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatan seperti şadaqah satu kali" (HR. Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).⁵

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.⁶

Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمِنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dan Nabi Saw bersabda. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya". (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi)⁷

⁵ Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, h. 812

⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 419

⁷ Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, h. 584

Bojonegoro” yang ditulis oleh Zainul Masyshuri tahun 1994 lebih mencakup peranan para *juragan* dalam memberi utangan pupuk kepada petani.¹⁵

Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian, letak geografis, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, dan keadaan sosial ekonomi.

b. Metode Interview

Interview, yang juga disebut dengan wawancara, adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada praktek utang-piutang bersyarat.²⁵

Metode ini digunakan selain untuk memperoleh informasi tentang utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik dari beberapa pandangan tokoh agama, juga untuk menggali data tentang utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat Mengare Watuagung Bungah Gresik.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²⁶

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, h. 136

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, h. 193

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 131

BAB II

A. Utang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Utang-Piutang

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *al-qard*, yang menurut bahasa berarti القرض (potongan), dikatakan demikian karena *al-qard* merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*).¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata *al-qard*.

1. Menurut Hanafiyah, *qard* diartikan sebagai berikut:²

مَاتَعَطِيْهِ مِنْ مَّالٍ مِّثْلِيَّ تَقْتَضَاهُ

Artinya: "Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya".

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرٍ يَرُدُّ مِثْلُهُ

Artinya: "Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya".

2. Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³

¹ H. Rahmat Syaife'i, *Fiqih Muamalah*, h. 151

² *Ibid.*, h. 151

³ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, h. 27

bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.¹¹

Adapun *qard* diperbolehkan dengan dua syarat, antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqrid*). Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqrid*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtariq*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqtariq*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqrid* dan *muqtariq* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.¹²

2. Dasar Hukum Utang-Piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah

¹¹ Qard. www.mail-arcive.com

¹² Qard, www.niriah.com

memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".¹⁷*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨}

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".*¹⁹

¹⁶Al- Qur'an, 2:282

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

¹⁸ Al- Qur'an, 2:280

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

Artinya: *"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Bahwasannya Allah mengangkat penanya dari tiga orang, yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dari anak kecil sampai baligh".²⁶*

2) Syarat-syarat *ma'qūd 'alayh* (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman (*al-qard*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.²⁷

Dalam masyarakat penelitian yang menjadi obyek utang-piutang adalah uang. Misalnya seorang (A) meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,- pada (B) dan (B) memberikan (utang) sebesar uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan. Untuk itu, obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan, penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abud Daud*, Juz 2, h. 431

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, h. 110-111

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٢١}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".³⁰

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan *sigat*, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.³¹

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 38

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".⁴¹

Apabila pihak yang berhutang mempercepat pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat yang memperbolehkan hal seperti ini.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Pada dasarnya pembayaran utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat lain.⁴²

Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 44

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.⁴⁷
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".⁴⁸

Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai ganti sesuatu yang sejenis hanya dapat dibenarkan jika tidak mungkin menempatkan sesuatu itu yang sejenis dan atas persetujuan pihak berpiutang.⁴⁹

Suatu perjanjian utang-piutang dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: balig, berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, h. 46

yang terdapat dalam empat ayat, salah satunya turun di Mekkah dan tiga ayat lainnya turun di Madinah.⁶⁴

Ayat pertama:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْثُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِثُوهُ عِنْدَ اللَّهِ... (الروم: ٣٩)

Artinya: *"Dan suatu riba (kelebihan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah".* (QS. Ar-Rum: 39).⁶⁵

Perhatian ayat ini tidak langsung pada hukum haram, hanya mengisyaratkan bahwa riba bukanlah sesuatu yang baik.

Ayat kedua:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّ وَقَذَّ ثُهُوهُمَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
(النساء: ١٦١)

Artinya: *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS. An-Nisa': 161)*

Ayat ini juga tidak mengharamkan riba, hanya untuk membimbing dan mengarahkan kesiapan jiwa menerima diharamkannya riba. Dan Allah akan mengutuk dengan keras praktek riba.

Ayat ketiga:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (ال عمران: ١٣٠)

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 647.
⁶⁵ Ibid, 90.

Para ulama fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhhal*.

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Sedangkan riba *faḍal* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya. Riba *nasi'ah* sering disebut juga dengan nama riba *jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman *jahiliyah* dan sering juga disebut dengan riba *al-qarḍ*, karena terjadi dalam utang piutang. Contoh riba *nasi'ah*. Hakikat riba nasi'ah ialah si A mempunyai piutang pada si B yang akan dibayar pada suatu waktu. Ketika telah jatuh tempo, si A berkata kepada si B, "Engkau melunasi hutangmu, atau q beri tempo waktu dengan uang tambahan." Jika si B tidak melunasi hutangnya pada waktunya, si A meminta uang tambahan dan memberi tempo waktu lagi. Begitulah hingga akhirnya dalam beberapa waktu hutang si B menumpuk berkali-kali lipat dari hutang awalnya. Di antara bentuk lain riba jahiliyah ialah si A meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar kepada si B hingga waktu tertentu dan si B harus mengembalikan hutangnya plus

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalaah*, h. 37.

b. Batas wilayah Desa Watuagung

- 1) Sebelah Barat : Desa Bedanten
- 2) Sebelah Utara : Desa Tajung Widoro
- 3) Sebelah Timur : Desa Kramat
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Manyar

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografis Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan desa yang kurang penduduknya. Jumlah penduduk Desa Watuagung tersebut mencapai 2.606 jiwa dengan rincian,¹ 1.268 orang laki-laki dan 1.338 orang perempuan.

- a) Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 720 orang, dan secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

**DAFTAR KSK DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
AWAL TAHUN 2009**

No	RT	Jumlah Penduduk			Jumlah KSK	Ket
		L	P	Total		
1	I	100	101	201	56	
2	II	117	122	239	67	
3	III	62	54	116	30	
4	IV	105	113	218	65	

¹ Profil Desa Watuagung, h. 15

b. Jama'iyah Diba'

Selain itu kegiatan tersebut juga mengundang para ustadz atau kyai untuk memberikan ceramah (*maw'idoh hasanah*) kepada para jamaahnya. Dan manfaat jam'iyah ini antara lain:

- Jama'iyah Diba' merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah membaca diba' shalawat Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga terbagi menjadi dua pokok jama'ah, yakni jama'ah putra dan jama'ah putri. Adapun untuk putra pelaksanaannya pada hari Senin ba'da shalat Isya', sedangkan untuk yang putri diadakan seminggu tiga kali yaitu hari

c. Jam'iyah Khatmil Qur'an

d. Jam'iyah Manaqib

e. Pengajian rutin

Pengajian ini difokuskan kepada kaum bapak dan remaja putra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat setelah shalat Isya'. Adapun tempatnya diadakan di rumah para anggota secara bergiliran dengan

mengundang para ulama' atau kyai setempat untuk memberikan pengajian dengan materi yang diambil dari tafsir Al-Qur'an dan Hadis.

f. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak ini biasanya dilaksanakan di mushalla-mushalla atau masjid Desa Watuagung. Sekarang pengajian ini disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau diniyah yang dibimbing oleh para ustaz dan ustazah. Untuk hari Kamis anak-anak diharuskan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh para ustaznya.

g. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Watuagung di setiap ada peringatan Hari Besar Islam dengan mengadakan acara sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Watuagung dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islam. Kegiatan ini biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.
- 2) Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum muda-mudi Desa Watuagung dengan rangkaian kegiatan antara lain:
 - a) Lomba keagamaan
 - b) Pengajian umum
 - c) Peringatan Maulid Nabi

- ## 5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Watuagung Bungah Gresik sebagian besar adalah petani tambak. Di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, nelayan dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Watuagung sebagaimana tabel 3.2 berikut. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Watuagung yang sebagian besar terdiri dari lahan pertambakan.⁵

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Watuagung:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani tambak	122 orang
2	Nelayan	102 orang
3	Guru	16 orang
4	PNS	3 orang
5	Bidan	1 orang
6	Pedagang	21 orang

⁴ Profil Desa Watuagung, h.27

⁵ Profil desa Watuagung, h.30

B. Deskripsi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Watuagung Bungah Gresik

Dalam melakukan transaksi utang-piutang bersyarat, masyarakat di Desa Watuagung Bungah Gresik melakukan beberapa tahapan, antara lain:

1. Perjanjian Utang-Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Watuagung adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil tambak yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat tambak, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani tambak biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Mengare Watuagung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.

Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Watuagung yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada bank, namun mereka tetap meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat Watuagung atau para petani tambak untuk

meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat. Seorang petani tambak yang mau meminjam uang pada bank harus mempunyai sertifikat tanah atau harus mempunyai barang jaminan lainnya. Masyarakat Watuagung tidak memiliki sertifikat tanah. Bukti kepemilikan masih menggunakan petok D. Jika ada seseorang meminjam uang pada bank dengan menggunakan petok D, bank hanya memberikan pinjaman sedikit dan tidak cukup untuk membiayai operasional pertanian (pembibitan).

Sementara, jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar. Misalnya harga bandeng per kilo Rp 10.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 8.000 per kilo. Di situ kreditur (juragan) mendapat keuntungan 20 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Watuagung.⁶

⁶ Zainul Mualimin, *Wawancara*, Mengare, 2 Juli 2009, pukul. 10.00 WIB.

2. Syarat-Syarat Utang-Piutang

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur (juragan) dan debitur yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur yang berhutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
- 2) Debitur yang berhutang harus berutang di atas Rp 3.000.000
- 3) Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang

⁷ Nasir, *Wawancara*, Mengare, 3 Juli 2009, pukul 14.00 WIB

untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utangnya. Jika hasil panennya sedikit maka juragan mengambil separuhnya.¹¹

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya dahulu, kalau orang yang berhutang panen lagi, maka juragan akan mengambil hasil panennya.¹²

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirlah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung

1. Pendapat KH. Jamil

KH. Jamil, berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik bersifat konsumtif. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang

¹¹ Kastari, *Wawancara*, Mengare, 7 Juli 2009, pukul 16.00 WIB

¹² Zainuri, *Wawancara*, Mengare, 14 Juli 2009, pukul 10.00 WIB

Beliau juga mengemukakan utang menjadi rusak karena mengambil keuntungan itu kreditur, seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambah.

Ada beberapa contoh yang dilontarkan Marzuki dalam menanggapi soal hutang bersyarat pertama, tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor dengan disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali r.a.diterangkan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ

Artinya: Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) adalah termasuk *riba*.²⁰

²⁰ Ibid, h.812

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UTANG-PIUTANG BERSYARAT

Beberapa tokoh agama berbeda pandangan dalam menyikapi persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat yang telah mentradisi di kalangan petani tambak di Desa Mengare Watu Agung Bungah Gresik. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang masih *debatable* dikalangan para tokoh agama setempat.

Menurut Jamil, memberikan utang, pada dasarnya, merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong-menolong. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, pertolongan dari kreditur merupakan refleksi dari firman Allah surat al-Mā'idah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: ٢)

Artinya: "Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan."¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 157

Sedangkan menurut Ghofur utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watu Agung sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, utang-piutang bersyarat ini tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik, karena untuk mencari pelanggan tetap dan mengembangkan

Artinya: "Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan"²

Begitu juga pandangan Jamil dan Ghofur tentang tradisi yang baik dan tidak bertentangan hukum Islam dapat diterima karena didasarkan pada hadis Nabi:

Artinya: "Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik."³

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka dihadapan Allah dipandang baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

³ Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, h. 416

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap umat manusianya.

Penekanan maqashid syari'ah yang dilakukan Jamil dan Ghofur secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, Jamil dan Ghofur mengutip Al-Syatibi bahwa:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا

Artinya: "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat"⁵

Al-Syatibi juga mengungkapkan yang lain

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.

Artinya: *"Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba"*⁶

Berdasarkan hadis-hadis diatas, Jamil dan Ghofur mengatakan bahwa maqashid syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatan, dapat dianalisis melalui maqashid syari'at yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam memberikan pondasi yang penting yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syari'at.

⁵ Asa'ri Jaya Bakri, *Konsep maqashid syari'ah*, h. 64

⁶ *Ibid*, h. 64

Alasan penolakan Marzuki terhadap tradisi utang-piutang masyarakat petani diperkuat oleh contoh bahwa: tidak sah seseorang yang mengutamakan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan debitur memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji).⁸ Selain contoh tersebut, alasan Marzuki juga ditopang oleh pandangan Imam Abu Ishak. Ia mengatakan bahwa tidak boleh utang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang mengutangi dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya.⁹ Artinya, suatu utang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

⁸ Ali Fikri, *al-Mualamatul Jilid 1*, h. 353

⁹ Abi Ishaq, *Fi- Fiqih Madzbi Imam Asy-Syafi'i Jilid 1*, h. 420

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berawal dari beberapa orang yang ekonominya lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membuat kreditur berinisiatif untuk memberikan utang kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa syarat, yaitu debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Utang-piutang bersyarat tersebut dilakukan dengan cara sederhana, debitur melakukan pengajuan kepada kreditur, kemudian kreditur memberikan persetujuan akan memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur, persetujuan didasari saling percaya dari dua belah pihak, dengan kata lain orang yang berhutang akan mendapatkan persetujuan tanpa menyertakan latar belakang dan juga jaminan seperti yang dilakukan oleh pihak bank saat memberikan kredit kepada nasabah pada umumnya.

2. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu tokoh mengatakan, jika kreditur dalam melakukan utang-piutang bersyarat hanya bertujuan untuk mencari keuntungan sepihak dari transaksi tersebut, maka tidak diperbolehkan.
3. Dalam prakteknya, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab dalam utang-piutang tersebut sudah menjadi tradisi yang baik dan saling memberikan keuntungan bagi kedua pihak, apabila dihilangkan akan membawa kesulitan dalam usaha dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Utang-piutang bersyarat tersebut bersifat *ḍarurat*. Dalam Islam, *ḍarurat* dapat menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi boleh untuk melakukannya, sebagaimana kaidah fiqihnya: "Sesuatu yang dilarang boleh dilakukan kalau sifatnya *ḍārūrāt*."

